



Buletin Parlementaria

Nomor 1033/II/XI/2018 • November 2018

PAMERAN FILATELI
PALAM PANGKA

ARI AHUWAN



Era Globalisasi, Prangko Masih Relevan



9 772614 339005

DPR Berkomitmen Terus Terbuka Kepada Masyarakat



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (kanan) saat pembukaan Pameran Filateli dalam rangka Hari Pahlawan

Foto: Andri/rni

Era Globalisasi, Prangko Masih Relevan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, dari 179 Pahlawan Nasional yang telah dikukuhkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, baru ada sekitar 40 Pahlawan Nasional yang diterbitkan dalam bentuk prangko. Pada tahun 1960-an, ada sejumlah Pahlawan Nasional yang telah diterbitkan dalam bentuk prangko, tetapi belakangan jumlahnya semakin sedikit. Menurut Fadli, prangko di era globalisasi ini masih relevan.

Prangko sebagai tanda pengingat dan juga sebagai sebuah tanda peringatan. Meskipun kita berada di era globalisasi, ternyata keberadaan prangko masih relevan. Justru ketika dunia semakin digital, sesuatu yang bersifat material itu menjadi semakin berharga,” ujar Fadli saat membuka Pameran Filateli dalam rangka Hari Pahlawan di Selasar Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (06/11).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menilai, kini prangko merupakan benda yang langka, bahkan selalu dicari. Ia pun mengisahkan beberapa waktu lalu saat dirinya menghadiri sebuah konferensi di Turki, ternyata salah satu souvenir yang dibagikan kepada para Pimpinan Parlemen yang hadir adalah prangko.

“Mereka masih menggunakan prangko dan benda-benda filateli sebagai souvenir. Saya kira hal ini menjadi sesuatu hal yang masih relevan. Saat menggelar acara *World Parliamentary Forum* di Bali beberapa waktu yang lalu, BKSAP DPR RI juga menjadikan prangko prisma sebagai souvenirnya,” jelas Fadli.

Dikatakan legislator Partai Gerindra itu, dalam dunia filateli, periode antara tahun 1945 hingga 1949 dikenal sebagai era Perang Mempertahankan Kemerdekaan (PMK). Prangko atau benda filateli yang terbit pada era tahun 1945 – 1949 adalah benda-benda filateli yang masuk kategori PMK.

“Di usia negara Indonesia yang ke 73 tahun, untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan

Indonesia dari tangan penjajah, DPR RI menyelenggarakan acara Pameran Filateli dalam rangka Hari Pahlawan,” tutur legislator dapil Jawa Barat itu.

Dalam pembukaan Pameran Filateli tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan Sampul Peringatan Pameran Filateli dalam rangka Hari Pahlawan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, dan Direktur Pos Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ikhsan Baidirus.

Agus menilai, Pameran Filateli ini dapat dijadikan sebagai sarana belajar sejarah. Karena prangko menjadi penanda sebuah peristiwa dan juga sebagai penunjuk identitas nasional. “Pameran prangko sebagai alat sosialisasi pemersatu bangsa dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika,” kata legislator Partai Demokrat itu.

Dalam acara ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba puisi, pemenang lomba cerita, dan pemenang lomba desain kartu pos. Ada tiga orang pemenang dari masing-masing kategori yang dilombakan itu. ■ dep/sf

Komisi II Nilai NTT Siap Sambut Pemilu 2019

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI meninjau persiapan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, dalam hal ini Pemilihan Presiden (Pilpres) dan dan Pemilihan Legislatif (Pileg). NTT dinilai sudah siap menyambut pesta demokrasi pada tahun 2019 mendatang.



Foto bersama Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur NTT beserta jajaran

“ Kami mendapatkan informasi dari Wakil Gubernur, secara umum kami lihat NTT sudah siap menghadapi pemilu 2019,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali usai memimpin rapat Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi beserta jajaran di Kantor Gubernur Provinsi NTT, Oebobo, Kupang, Jumat (02/11).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Pua Geno itu, Zainudin mengatakan, beberapa hal yang dipantau secara langsung oleh Tim Kunker Komisi II DPR RI yaitu, terkait pelaksanaan pelayanan publik dan masalah kependudukan yang menjadi bagian penting dalam kontestasi Pemilu tahun 2019.

Zainudin juga mendorong perekaman KTP-elektronik (KTP-el) segera diselesaikan. Mengingat, sampai Oktober 2018 terdata 651.000 warga Provinsi NTT yang belum merekam KTP-el. Diharapkan, dapat segera selesai, sehingga tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih pada Pemilu tahun depan.

“Saya pikir masih ada waktu untuk memperbaiki, seperti KTP-el, DPT (Daftar Pemilih Tetap, RED) dan berbagai hal teknis terkait kesiapan daerah melaksanakan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019,” papar legislator Partai Golkar ini.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada setiap bupati dan walikota untuk mempercepat perekaman KTP-el. Kecamatan dan kelurahan juga didorong untuk berperan aktif mendata serta menjemput bola, melalui pelayanan keliling KTP-el. ■ ann/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah, Geraldii Opie
ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

Foto: Anne/rni

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Eko Priyanto, S.E. (Plt. Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita, Ani Permata Sari
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan

Komisi II DPR RI menilai banyak konflik pertanahan yang timbul akibat tumpang tindihnya pemberian izin dan pemberian legalitas terhadap kepemilikan tanah. Konflik yang terjadi tersebut baik antara masyarakat dengan korporasi, korporasi dengan korporasi, maupun antara pertambangan dengan perkebunan.



Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI bertukar cenderamata dengan Pemprov Lampung

“Tentu hal ini harus diselesaikan secara tuntas dan komprehensif, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi hukum,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung, Jumat (02/11).

Demikian pula jika kita ingin menuju kepada kedaulatan energi, semua sektor energi yang bisa dikembangkan juga harus disiapkan lahannya,” jelasnya.

Dikatakannya, dalam pertemuan dengan mitra kerja Komisi II DPR RI di Lampung, ada pengaduan bahwa jalan tol yang sedang

Herman mengatakan, seluruh lahan yang dimiliki oleh negara harus betul-betul dikelola dengan baik dan diefektifkan. “Kalau kita ingin menuju pada ketahanan dan kedaulatan pangan serta kemandirian pangan, maka lahan pangannya harus dicukupi.

dibangun saat ini di wilayah Lampung, juga terjadi tumpang tindih legalitas kepemilikan. Dimana masyarakat mengklaim bahwa ada lahan milik mereka yang digunakan untuk pembangunan jalan tol tersebut.

Sementara terkait dengan persoalan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, legislator Partai Demokrat itu menyatakan bahwa masih banyak aspek yang harus didalami lagi. Diantaranya tentang kesiapan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

“Di KPU dan Bawaslu kami juga masih menemukan interpretasi yang berbeda atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Salah satunya pada pasal 286 terkait dengan persoalan pemberian terhadap masyarakat,” ungkap legislator dapil Jawa Barat itu sembari mengusulkan agar ada petunjuk teknis (juknis) yang bisa menjelaskan hal itu. ■dep/sf

Kekurangan Hakim di Indonesia Timur Perlu Mendapat Perhatian

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Maluku Utara mendapat beberapa keluhan dari Pengadilan Tinggi Agama, terutama terkait dengan struktural. Secara struktural, Pengadilan Tinggi hanya bekerja di 5 kabupaten/kota di Malut. Sementara ada 9 kabupaten/kota di Malut. Jumlah ketersediaan hakim sangat kurang, walau Mahkamah Agung (MA) sudah memberi arahan untuk membuat hakim tunggal. Hal ini harus mendapat perhatian.

“Ada defisit jumlah peradilan dibanding dengan jumlah kabupaten kota di seluruh Maluku Utara. Ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus. Komisi III akan meminta Mahkamah Agung untuk bisa menambah lebih banyak

jumlah hakim yang ditugaskan di daerah Indonesia timur, dan khususnya daerah daerah kepulauan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik saat memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Ternate, Malut.

Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Maluku Utara, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Maluku Utara, dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara di ruang pertemuan Kantor Pengadilan Tinggi Negeri Malut, Ternate, Jumat (02/11).

Legislator Partai Demokrat ini akan meminta MA untuk membuat aturan khusus, yang mengatur agar menugaskan hakim hakim yang sudah lolos seleksi untuk ditugaskan ke daerah-daerah Indonesia timur dan daerah yang kekurangan jumlah hakim, atau ketersediaan hakimnya masih rendah.

“Mahkamah Agung perlu membuat aturan khusus tentang hakim. Kami

Pembebasan Lahan Pelabuhan Kijing Bermasalah

Pembangunan pelabuhan internasional di Pantai Kijing, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat menyisakan masalah pembebasan lahan. Ternyata masih banyak warga setempat yang belum mendapatkan ganti rugi sesuai yang dijanjikan. Ada oknum yang ikut bermain terutama dari Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat dan Pelindo II.

masyarakat setempat mendapatkan hak-haknya. “Kita tahu ini program nasional, tapi bukan dengan cara menindas masyarakat atau membohonginya. Kita berharap pemerintah pusat memperhatikan permasalahan ini,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPR RI Firmansyah Mardanoes mengungkapkan, pembangunan pelabuhan bertaraf internasional ini dikerjakan Pelindo II dengan total anggaran mencapai Rp 5 triliun. “Ada oknum dari BPN maupun Pelindo yang bermain dalam menilai ganti rugi sertifikat tanah warga. Ini masih jadi kendala,” katanya saat diwawancarai **Parlementaria** di Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar, di Pontianak, Kamis (01/11).

Masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan pelabuhan sudah mengadu dan memperjuangkan haknya, tapi tak direspon BPN setempat maupun Pelindo. Sebagai wakil rakyat asal Kalbar, ia mengaku punya kewajiban moral untuk membantu



Anggota Komisi II DPR RI Firmansyah Mardanoes saat mengikuti Kunker Reses Komisi II DPR RI di Pontianak

Foto: Husen/rni



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Ternate

Foto: Azka/rni

tidak ingin ada daerah yang jumlah hakimnya banyak, khususnya di Pulau Jawa, sementara pulau-pulau di Indonesia timur, dalam hal ini provinsi-provinsi di Indonesia timur kekurangan hakim,”

terang legislator dapil Kalimantan Barat itu.

Dalam kesempatan Kunker itu, Erma dan seluruh Tim Kunker juga mendapat beberapa masukan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim, terkait persoalan mutasi secara regional.

“Karena itu, kita mendorong adanya mutasi regional nanti di RUU Jabatan Hakim. Karena data dari Komisi Yudisial menunjukkan sidang

etik yang dilakukan terhadap para hakim ini lebih banyak karena kasus perselingkuhan. Ini kan sesuatu yang tidak perlu terjadi kalau kita membuat sistem yang lebih baik,” tutupnya. ■ azk/sf

Pembangunan apapun yang direncanakan pemerintah mestinya tak mengorbankan hak-hak masyarakat atas tanahnya. Dalam banyak kasus, hak masyarakat atas tanah seringkali tak dihargai. Itu akan menyengsarakan hidup masyarakat ke depan.

Pemda yang ditugasi membebaskan lahan untuk pembangunan kerap terjebak pula pada kepentingan institusi sehingga memunculkan oknum-oknum yang menindas dan merugikan masyarakat.

Dalam kasus lahan di Pantai Kijing ini, para kepala desa dikerahkan Pemda menjadi ujung tombak pembebasan lahan. Bahkan para kepala desa dibodohi untuk dijadikan ujung tombak agar masyarakat mengikuti maunya mereka.

“Masyarakat dijanjikan ganti rugi tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Kepala desa menjanjikan ganti rugi sesuai dengan harga pasar dan nilai ekonomis yang ada,” tutup legislator dapil Kalimantan Barat itu. ■ mh/sf

Komisi III Cari Solusi Over Kapasitas Lapas

Komisi III DPR RI ingin mencari solusi bagaimana caranya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berisi tahanan-tahanan penjahat narkoba. Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir menjelaskan, masalah seperti ini memang sudah berlangsung cukup lama, bahkan hampir di seluruh Indonesia lapas mengalami over kapasitas.



Pertemuan Tim Kunjuran Komisi III DPR RI dengan mitra kerja di Palangka Raya

“Kami ingin menyisir dari awal, baik dari Kepolisian, Kejaksaan, sampai dengan Pengadilan. Bagaimana solusinya mengurangi masalah over kapasitas ini,” ujar Adies

saat pertemuan Tim Kunjuran Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan mitra kerja di Mapolda Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (01/11).

Diketahui, di Palangka Raya, over

kapasitas bahkan mencapai 400 persen, dan sekitar 60–80 persen diisi oleh narapidana narkoba. Setelah melakukan kunjungan di berbagai daerah, Adies bersama Komisi III DPR RI akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait dan digelar rapat terpadu, supaya permasalahan over kapasitas ini bisa diatasi.

“Pencegahan diawal merupakan salah satu solusi yang baik, apakah memasukkan dia (penyalahguna narkoba, RED) ke lapas bisa menyembuhkan atau malah lebih parah. Kita bisa memulai pencegahan dari rumah, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anaknya, dan peran tokoh masyarakat dan para akademisi dalam sosialisasi anti narkoba,” ujar Adies.

Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Kalteng Anthonius Ayorbaba menjelaskan, imbas over kapasitas ini salah satunya adalah kurangnya bahan makanan di lapas. “Setiap tahun anggaran penyusunan RKAKL kita sudah melakukan estimasi, tapi setiap tahun estimasi itu mengalami pergeseran, karena jumlah narapidana dan tahanan baru itu selalu melebihi. Secara langsung mempengaruhi realisasi anggaran bahan makanan,” tutup Anthonius. ■ eno/sf

Hak Warga Binaan Belum Terealisasi

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mencermati, hak-hak warga binaan atau narapidana (napi) belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, terutama hak-hak terkait dengan pembebasan bersyarat, yang merupakan sesuatu yang bersifat urgent bagi warga binaan, untuk segera bertemu dengan sanak keluarganya.

“Karena sejujurnya mereka ingin keluar bertemu dengan sanak famili dan berbaur dengan masyarakat, tapi justru hak ini belum terealisasi,” kata Nasir saat mengikuti Kunjuran Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (02/11).

Nasir melanjutkan, meskipun sudah diberlakukan dengan model elektrik pada setiap sistem di lapas guna memenuhi hak-hak mereka, tapi sayangnya hak-hak warga binaan ini belum dipenuhi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini yang menjadi



Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil

sorotan penting Komisi III DPR RI dalam kunjungan ke Sumut ini.

“Dan yang sangat kami sayangkan adalah tidak ada penjelasan terhadap warga binaan. Sementara ini mereka menunggu tanpa ada suatu kejelasan terkait pembebasan bersyarat tersebut yang tidak pernah turun-turun,” tambah Nasir.

Legislator PKS ini menekankan kepada Kemenkumham, jangan sampai slogan “Kami PASTI” atau “Kami Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif” menjadi ketidakpastian bagi warga binaan. Sehingga warga binaan bisa segera mendapatkan kejelasan terkait informasi tersebut.

“Nantinya dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM kami akan tanyakan dimana sebenarnya kendala tersebut berada, karena ini menyangkut hak asasi manusia,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Aceh ini. ■ cas/sf



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Bulog di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

Komisi IV Pertanyakan Banyaknya Beras Impor di Bulog Bitung

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengkritisi banyaknya beras impor yang ada di Gudang Bulog di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Roem mengaku cukup terkejut melihat gudang ini yang lebih banyak berisi beras impor dibanding beras lokal. Ia pun mempertanyakan jumlah beras impor dan lokal yang ada di gudang itu secara keseluruhan.

“ Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan masuknya beras impor. Bagaimana dengan penyerapan hasil panen petani lokal. Serta bagaimana pendistribusian beras bulog selama ini,” tanya Roem, usai meninjau Gudang Bulog Bitung bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, di Bitung, Sulut, Kamis (01/11).

Dari penjelasan Kepala Bulog Bitung diketahui bahwa beras impor yang ada di gudang tersebut sebanyak 18 ribu ton.

Sementara beras lokal hanya 3 ribu ton. Namun beras impor tersebut menurut mereka hanya sebagai beras cadangan.

“Seperti jika terjadi kondisi tertentu seperti banyaknya petani yang gagal panen, atau pun harga beras di pasaran terlalu tinggi. Dengan kata lain beras impor bisa sebagai penyangga,” jelas legislator Partai Golkar ini.

Sementara itu, terkait penyerapan Bulog Bitung terhadap hasil panen petani lokal, menurut penjelasan pihak Bulog

Bitung kepada Komisi IV DPR RI ini tidak ada kendala. Artinya Bulog tetap membeli hasil produksi petani lokal dengan harga yang cukup tinggi atau di atas rata-rata harga pasar.

“Walaupun ketika menjualnya kembali ke masyarakat harganya juga lebih rendah dibanding harga pasar. Dengan kata lain Bulog memberikan subsidi dari selisih harga pembelian ke penjualan ke masyarakat,” imbuh legislator dapil Gorontalo itu.

Terkait masalah pendistribusian beras Bulog, Roem mengaku akan terus mendorong instansi pemerintah untuk menggunakan beras dari Bulog. Seperti penyaluran program beras sejahtera (rastra) oleh Kementerian Sosial, serta program-program kementerian lainnya. ■
ayu/sf

Komisi IV Apresiasi Penggunaan Teknologi Bioflok di Ngawi

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur Viva Yoga Mauladi mengapresiasi pelaksanaan program budidaya ikan menggunakan teknologi bioflok di Pondok Pesantren Putri Gontor yang dirasa sangat memuaskan, karena dapat memberikan benefit serta manfaat bagi Pondok Pesantren tersebut.

“ Kita melihat hasilnya sangat memuaskan, karena memberikan benefit, manfaat buat pondok pesantren putri, para santrinya senang makan ikan karena menambah protein ikan hewani,” katanya usai memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau budi daya Ikan Lele menggunakan sistem bioflok di Pondok Pesantren Gontor Putri, Sumberrejo, Kabupaten Ngawi, Jatim, Kamis (01/11).

Dalam kesempatan tersebut, legislator PAN itu menjelaskan bahwa

adanya kunjungan ini agar Komisi IV DPR RI dapat melihat secara langsung program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan soal pengembangan budi daya ikan menggunakan teknologi bioflok, mengingat program tersebut merupakan program pemerintah yang mendapat dukungan Komisi IV DPR RI.

Teknologi Bioflok sendiri dibuat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan nasional yang semakin tinggi, maka langkah utama yang perlu dilakukan adalah melalui intensifikasi

teknologi yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi bioflok dalam budi daya ikan di Kabupaten Ngawi tersebut.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan juga turut mendampingi kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke lokasi penerima bantuan budidaya ikan lele sistem Bioflok di Pondok Pesantren Gontor Putri, Ngawi.

Seperti disampaikan oleh Humas DJPB, dalam kesempatan ini dilakukan pennebaran benih serta panen ikan lele. Selain itu Komisi IV DPR RI dan DJPB memberikan 5 Ton Pakan Ikan Mandiri Kepada 10 Kelompok Pembudidaya Ikan di Ngawi.

Diketahui bahwa sistem bioflok merupakan suatu sistem pemeliharaan ikan lele yang menumbuhkan suatu mikroorganisme, yang memiliki fungsi untuk mengelola limbah budidaya itu sendiri, hingga menjadi gumpalan kecil (floc) yang dimanfaatkan langsung sebagai makanan alami bagi lele. ■ nt/sf



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau lokasi budi daya ikan lele dengan menggunakan bioflok di Pondok Pesantren Putri Gontor di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Foto: Nita/rni



Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan memimpin panen ikan bawal bintang di Batam, Kepulauan Riau

Nelayan Kepri Kekurangan Benih Ikan

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi bahwa nelayan-nelayan di Pulau Setokok, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih kekurangan benih ikan, sementara benih-benih ikan ini sangat diperlukan oleh para nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Selain sulit untuk mendapatkannya, harga beli benih juga tinggi. Bahkan kualitasnya juga tidak sebaik yang dihasilkan Balai Budidaya Laut Batam.

“Balai Budidaya Laut di Batam ini bukan hanya menghasilkan benih ikan untuk Batam dan sekitarnya, tapi bahkan hingga Sumatera dan Kalimantan,” jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Balai Budidaya Laut Batam, Pulau Setokok, Kepri, Kamis (01/11).

Dalam pertemuan terungkap bahwa Balai Budidaya Laut di Kepri ini memiliki target dapat melakukan ekspor 360 ton benih ikan setiap bulannya, tetapi baru dapat terpenuhi tidak sampai 20 persen, karena masih kekurangan benih.

“Ke depan, Komisi IV DPR berharap Balai Budidaya Laut ini bisa dikembangkan di sejumlah titik di Indonesia dalam rangka mendorong para nelayan budidaya agar semakin berkembang. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan devisa melalui sektor perikanan,” papar Daniel.

Komisi IV DPR RI juga mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengajukan titik-titik yang dapat menjadi pusat pembudidayaan benih, sehingga tidak hanya bergantung pada Balai Budidaya Laut di Batam saja. “Minimal ada pusat budidaya benih yang

dapat mewakili satu pulau,” tambah legislator PKB itu.

Pemerintah juga harus terus meningkatkan sektor perikanan di Indonesia, mengingat salah satu sektor yang berperan dalam peningkatan devisa negara adalah sektor perikanan. “Ketika perekonomian Indonesia sedang ambruk, yang menyelamatkan devisa negara, salah satunya adalah sektor perikanan, karena eksportnya sangat meningkat. Hal tersebut dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah, agar Indonesia dapat menjadi eksportir terbesar di dunia dalam sektor budidaya perikanan,” tutup legislator dapil Kalbar itu. ■ ica/sf



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Jembatan Petuk, di Kupang NTT

Komisi V Harap Jembatan Petuk Jadi Ikon Kupang

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis (F-Gerindra) berharap nantinya Jembatan Petuk yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat menjadi obyek wisata baru di wilayah itu dan menjadi ikon Kota Kupang. Dana yang dihabiskan untuk pembangunan jembatan ini sekitar Rp 235,5 miliar.

“Jembatan Petuk nantinya akan dijadikan sebagai salah satu obyek wisata foto dan juga ikon di Kota Kupang ini,” ujar Fary saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau Jembatan Petuk, Kupang, NTT, Jumat (02/11). Turut mendampingi kunker ini, Wali Kota Kupang Jefirstson Riwu Kore dan mitra kerja Komisi V DPR RI. Nantinya, lanjut Fary, jembatan ini juga akan ditambahkan ornamen-ornamen yang memperkuat ciri khas NTT. Untuk mendukung pengembangan jembatan itu, Komisi V DPR RI juga telah menyetujui anggaran bagi penambahan ornamen

jembatan. “Dan kami harap ada masukan dari pemerintah daerah untuk nuansa lokalnya ada dalam desainnya,” tutur Fary.

Fary berharap, pihak terkait juga segera bekerja dalam mempercantik jembatan ini, agar dapat langsung

Kami akan meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang, untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan Kota Kupang, sehingga dipasang ornamen khas NTT

dinikmati oleh wisatawan dan juga warga lokal. “Kami akan meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang, untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan Kota Kupang, sehingga dipasang ornamen khas NTT,” ucap legislator dapi NTT itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Kupang Jefirstson Riwu Kore berterima kasih kepada Komisi V DPR RI yang telah memberikan perhatian khusus untuk Kota Kupang. “Harapan kami bahwa ini menjadi ikon Kota Kupang dan tentunya akan menjadi tempat wisata bagi warga,” ucapnya. ■ jay/sf

Komisi V Dorong Percepatan Pembangunan Bendungan Sei Wampu

Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan Bendungan Sei Wampu, di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, supaya bisa memasok kebutuhan air baku dan dapat mengaliri persawahan bagi masyarakat Medan dan sekitarnya. Bendungan untuk mengairi 11 ribu hektar areal persawahan ini ditargetkan selesai akhir 2019.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo bersama Tim Kunker Komisi V DPR RI saat meninjau Bendungan Sei Wampu, Langkat, Sumut

Foto: Anchi/rni

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Sei Wampu, Langkat, Sumut, Kamis (01/11). Bendungan yang menghabiskan dana Rp 250 miliar ini pembangunannya telah mencapai 72 persen.

“Target hingga akhir 2019 selesai. Pembangunan ini dilakukan secara langsung. Beberapa tahun kemudian, masuk tahun anggaran 2019,” kata Sigit, usai mendapat penjelasan dari Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Amir Hamzah.

Persoalan selama ini, sambung Sigit, pengerjaan pembangunan bendungan ini memakan waktu kurang lebih 5 tahun. Padahal menurutnya bisa dikerjakan 2 tahun. Ia mengaku, jika Komisi V DPR RI sebelumnya mengetahui pembangunan bendungan ini memakan waktu lama, pihaknya akan mendorong pembangunan agar lebih cepat.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, desain bendungan ini memanfaatkan Sungai Sei Wampu. Luas lahan persawahan yang selama ini lebih dari 11.000 hektare, tapi yang produktif lebih kurang 5.000 hektar.

“Bendungan ini memiliki dua jaringan, kanan dan kiri. Jaringan kiri ditujukan untuk mengairi persawahan seluas 3.832 hektar. Sementara saluran kanan mengairi lebih kurang 7.159 hektar. Seluruhnya di Kabupaten Langkat,” terang legislator dapil Jawa Timur itu.

Sigit berharap bendungan ini segera bisa digunakan untuk mengairi persawahan agar bermanfaat bagi masyarakat. “Nah, kalo pembangunan bendungan ini cepat selesai tentunya dapat meningkatkan produksi dan jumlah panen persawahan yang dialiri bendungan tersebut,” harap Sigit. ■ man/sf

Komisi V Tinjau Kondisi Infrastruktur Bali

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, akan memetakan terlebih dahulu kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak bagi Provinsi Bali. Mengingat ada banyak persoalan yang dihadapi Bali yaitu kemacetan, *crowded*-nya Bandara Ngurah Rai, hingga soal ketersediaan air bersih di Bali.

Hal itu diungkapkannya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran di Kantor Gubernur Bali, Kamis (01/11). Turut hadir seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Pertama, kita tahu Bali sekarang ini jalan juga sudah mulai macet. Tentu jalan juga menjadi prioritas utama. Makanya kita minta bagaimana skema jaringan jalan yang akan dibangun oleh Kemen PUPR yang merupakan jalan nasional, itu juga sudah disampaikan.

Tentu kami akan tindak lanjuti bentuk penganggarannya,” ungkap Lasarus, usai pertemuan.

Persoalan Bandara juga turut mengemuka, dimana menurut data pada tahun 2026 nanti jumlah penumpang yang akan memenuhi Bandara Ngurah Rai berkisar 37,6 juta penumpang. Menurut Lasarus, saat ini dengan jumlah 21 juta penumpang lebih ditambah kondisi fasilitas yang ada, hanya dapat mampu menampung 24 juta penumpang. Tentunya ini dibutuhkan perluasan bandara atau malah dibutuhkan adanya pembangunan bandara baru.

“Tentu ini dalam tempo waktu 5 tahun ke depan, 37,6 penumpang ini akan terpenuhi. Jadi menurut kami, 2019 paling lama pembangunan bandara di Bali utara

ini seharusnya sudah dimulai ya, paling tidak dengan penetapan lokasi dulu,” kata legislator PDI-Perjuangan itu.

Begitu pun dengan persoalan air bersih yang ada di Bali, Lasarus meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kemen PUPR untuk dapat mengatasi persoalan krisis air bersih di Bali. Mengingat kebutuhan air bersih adalah kebutuhan yang mendasar yang akan berdampak pada daya dukung Bali sebagai pusat pariwisata dunia.

“Hal-hal mendasar inilah yang ingin kami petakan, supaya nanti betul-betul bisa mendapat *support* yang cepat dari pemerintah pusat. Karena memang tugas kami dari politik anggaran di Komisi V bersama mitra kami, baik Kemenhub maupun Kemen PUPR,” kata legislator dapil Kalimantan Barat itu.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menyatakan telah memprogramkan akan membangun bandara baru di Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk menyeimbangkan ekonomi masyarakat Bali yang ada di Bali utara dan selatan. Ia menyerahkan seutuhnya pembangunan infrastruktur Bali ke Komisi V DPR RI, karena minimnya APBD. ■ *ndy/sf*



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Waduk Muara, Nusa Dua, Provinsi Bali

Foto: Nedia/mi



Foto: Iwan/rni

Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menggelar pertemuan dengan PT. PLN (persero) UIW Kalbar

Komisi VII Soroti Pasokan Listrik Kalbar

Komisi VII DPR RI menyoroti masalah kelistrikan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini karena persoalan keterbatasan pasokan energi listrik yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Padahal Provinsi Kalbar juga memiliki sumber energi yang cukup banyak dan beragam, selain itu juga memiliki potensi energi yang dapat dikembangkan.

“Penanganan terkait kelistrikan harusnya bisa lebih maksimal,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar, di Kantor PLN UIW Kalbar, Jumat (02/11).

Gus Irawan melihat, kondisi nyata pasokan listrik di Kalbar belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Dimana rasio elektrifikasi masih di bawah rata-rata. Hal tersebut, lanjutnya, penting diperhatikan secara serius, mengingat energi listrik merupakan suatu yang mendasar agar menarik investor datang ke daerah Kalbar.

“Ternyata di Kalbar masih ada 150 Megawatt (MW) listrik impor dari Malaysia. Kalbar ini setahu saya satu-satunya yang listriknya impor,” kritisi legislator Partai Gerindra ini.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II ini berharap, agar kondisi kelistrikan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam kebutuhan listrik di Kalbar tercukupi, sekaligus bisa memasok listrik untuk kebutuhan industri.

Hal serupa juga diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI asal dapil Kalbar Katherine Anggela Oendoen (F-Gerindra) dan Maman Abdurrahman (F-Golkar). Keduanya menilai masih banyak masyarakat di daerah, terutama di wilayah pelosok sampai hari ini belum menikmati listrik.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur PLN Regional Kalimantan Machnizon mengatakan, rasio elektrifikasi di daerah ini rata-rata sudah mencapai 85,18 persen. Upaya peningkatan hingga bisa mencapai 100 persen di tahun 2019, dilakukan dengan dua cara.

Pertama, untuk investasi satu rumah atau satu pelanggan yang biayanya di bawah Rp 20 juta akan dilayani dengan jaringan PLN. Sementara sisanya yang memerlukan investasi besar atau di daerah pelosok yang memakan biaya diatas Rp 20 juta dilakukan upaya pra-elektifikasi.

“Yakni dengan program pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yang diadakan oleh Kementerian ESDM, sambil setiap tahun PLN tetap menambah dan mengalirkan listrik secara permanen,” ujarnya.

Kemudian untuk rasio desa berlistrik, ia menyebutkan sesuai data Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sudah 100 persen. Yakni 70 persen dialiri listrik dari PLN dan sisanya dialiri listrik non PLN.

Terkait impor listrik dari Malaysia, Machnizon mengatakan ini menjadi pilihan paling rasional. Sebab, lanjutnya, lima tahun lalu kondisi kelistrikan di Kalbar khususnya jaringan sistem Khatulistiwa sangat parah.

“Pemadaman hampir setiap hari, itu lima tahun lalu sampai tahun 2015,” jelasnya. ■ iw/sf

Tunda Salur DBH Berdampak pada Keuangan Daerah

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mendapatkan keluhan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengingatkan, DBH merupakan hak daerah. Jika penyalurannya sampai tertunda, berpotensi memberikan dampak kepada keuangan daerah.

“Bagaimana daerah bisa membangun, jika DBH-nya ditunda salur, daerah juga punya tanggung jawab untuk pembangunan daerahnya,” kritisi legislator Partai Demokrat itu saat memimpin pertemuan antara Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan Plt. Gubernur Riau beserta jajaran, di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (02/11).

Terungkap pada pertemuan dengan Pemrov Riau itu, kondisi keuangan Riau mengalami guncangan dan defisit akibat tunda bayar tersebut, termasuk seluruh kabupaten/kota. Terutama daerah penghasil migas, merasakan dampak langsung dari tunda bayar yang dilakukan Kementerian Keuangan itu.

Menanggapi hal ini, Nasir mengatakan pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan memanggil pihak Kementerian



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir (kanan)

Salurkan Bantuan PKH ke Sumsel, Komisi VIII Temukan Fakta Menarik

Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengaku, pihaknya menemukan fakta menarik dalam penyaluran bantuan PKH ini. Pertama, Peserta PKH mestinya tidak boleh menerima bantuan PKH lebih dari lima tahun. Mereka harus diarahkan menjadi keluarga mandiri.

“Tidak boleh selamanya mereka menerima bantuan. Untuk itu, para pendamping dalam program ini harus betul-betul selektif memilih peserta PKH. Masalah kedua, sering ditemukan kesalahan informasi. Ada yang di bawah lima tahun tidak mendapat bantuan. Sementara yang di atas lima tahun masih mendapat



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat menyalurkan bantuan PKH di Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, SKK Migas, dan pihak terkait lainnya. “Tentunya akan kita upayakan secepatnya, dan kita dorong bagaimana agar bisa tuntas juga tahun ini,” tegas Nasir.

Diakui Anggota Dewan Dapil Riau ini, masalah ini menjadi problem yang serius bagi Pemprov Riau. Dirinya juga berjanji akan segera memanggil Pemprov, Pemkab serta Pemkot di Riau untuk pembahasan terkait DBH ini, sehingga bisa didesak sesegera mungkin agar dicairkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, Plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menjelaskan, angka tunda salur yang dilakukan pemerintah pusat ke Pemprov Riau untuk triwulan keempat tahun 2017 mencapai Rp 2,7 triliun lebih untuk semua di Riau.

“Semua mengalami kesulitan, bahkan sempat ada yang merumahkan pegawai honor seperti di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Jadi kami meminta bantuan, agar masalah ini disampaikan dan diselesaikan,” harap Wan Thamrin. ■ **ran/sf**

bantuan,” kata Sodik saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Sumsel, Kamis (01/11).

Oleh sebab itu, lanjut legislator Partai Gerindra ini, pihaknya membuat Panja Verifikasi Data. Pasalnya, meskipun Kementerian Sosial sudah membentuk Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) namun belum bisa memberikan data akurat. Menurut Sodik, data PKH di sejumlah daerah perlu diverifikasi kembali untuk kemudian divalidasi.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) juga harus menyisir kembali datanya dari RT/RW. Ada persoalan pada *processing* data yang mestinya dengan akses teknologi bisa memudahkan. Namun, harus diakui akses data PKH masih begitu lama dan beberapa datanya di daerah belum valid.

“Pemda melalui RT/RW belum maksimal mendata, karena ada proses administrasi yang memakan waktu. Mungkin RT/RW sudah menyampaikan, tapi masih ada pola *processing* data yang begitu lama. Harusnya dengan teknologi tidak selama ini,” kata legislator dapil Jawa Barat ini sembari memastikan pihaknya akan membahas hal ini dengan Pusdatin Kemensos, soal akses data PKH tersebut. ■ **af/sf**

Komisi VII Dorong Pemenuhan Kebutuhan Energi Jateng

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menjelaskan, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang berkembang perekonomiannya. Untuk menunjang kegiatan perekonomian dan investasi di Jateng, khususnya sektor manufaktur, tentunya memerlukan ketersediaan pasokan energi seperti listrik, BBM, dan Gas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Industri yang ada di Jateng.

“Komisi VII sangat konsen terhadap aspek-aspek pengembangan perekonomian Jawa Tengah, dan melalui Kunjungan Kerja ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan *updating* perkembangan berbagai persoalan yang sedang dihadapi di wilayah ini,” kata Ridwan saat pertemuan antara Tim Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI dengan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (01/11).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, untuk menunjang tumbuhnya industri di Jateng, salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya pembangunan infrastruktur pipa gas dari Gresik, Jawa Timur, ke Semarang, Jateng, atau dikenal dengan nama Gresem, yang diperkirakan akan selesai akhir tahun 2018 ini.

“Pembangunan infrastruktur gas tersebut diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri di Jawa Tengah yang

pada gilirannya mampu meningkatkan perekonomian Jawa Tengah, mendorong percepatan konversi BBM ke gas serta mewujudkan infrastruktur gas yang terintegrasi di Pulau Jawa,” harap Ridwan.

Anggota Dewan dapil Jawa Timur V ini melanjutkan, di bidang hulu Migas, di Jateng tepatnya di Blora masih terdapat beberapa sumur minyak tua yang perlu dikelola dengan baik, yang diharapkan menjadi sumber ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian daerah sekitar serta mampu memenuhi kebutuhan minyak di Jateng dan sekitarnya.

Dalam Kunker ini, Komisi VII DPR RI juga memberikan beasiswa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa di Jateng serta pemberian produk inovasi LPNK yang menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI. Pemberian secara simbolis akan diberikan oleh masing-masing mitra Komisi VII DPR RI kepada Gubernur Jateng. ■ **as/sf**



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam

Dana Haji Bermanfaat untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Islam

Kehadiran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diambil dari dana ibadah Haji sangat bermanfaat untuk pembangunan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Adanya SBSN tersebut merupakan sebuah angin segar bagi PTKIN yang selama ini masih merasa belum begitu diperhatikan.

Hal tersebut tercetus dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang ke Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Aceh, Kamis (01/11).

“Kita berkeyakinan bahwa manfaat SBSN dalam membangun PTKIN ini sangat besar dan kita akan kembali menghitung besaran nilai untuk SBSN ini diperbesar. Nanti kami akan menghitung dengan BPKH (Badan Pengelola

Keuangan Haji), sehingga dengan adanya SBSN tersebut bisa bermanfaat untuk membangun pendidikan di kampus Islam,” tutur Marwan.

Kehadiran Tim Kunker Komisi VIII DPR RI di UIN Ar-Raniry Aceh selain untuk mendorong pembangunan, juga mengingatkan kehati-hatian dalam penggunaan dana Haji tersebut. Pembangunannya juga harus amanah, cepat dan tepat.

“Ini merupakan uang haji yang dipinjam oleh negara menjadi surat

berharga yang syariah dan tidak boleh digunakan untuk yang lain dan harus untuk umat Muslim peruntukan dananya,” tutur legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sementara itu, Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry Bidang Administrasi Umum Syahbuddin mengakui, investasi infrastruktur dalam bentuk SBSN tersebut sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan fasilitas pendidikan.

“Investasi SBSN ini sangat bermanfaat untuk PTKIN dan dari sumber dana haji yang sudah selesai pembangunannya yaitu, Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Psikologi dan kemudian yang akan kita Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) serta Laboratorium terpadu,” tuturnya. ■ rh/sf



Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meninjau pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Ar-Raniry Aceh

Foto: Rlyan/rni



Foto: Hendra/Ani

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau RSUD Tanjung yang beratapkan tenda darurat di Kabupaten Lombok Utara, NTB

Pemulihan NTB Harus Dilakukan Secara Cepat

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan atau *recovery* Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa bumi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena meminta pemerintah untuk dapat bertindak lebih cepat, agar masyarakat dapat kembali menikmati fasilitas publik, salah satunya yakni rumah sakit.

Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses ke NTB, Komisi IX DPR RI sempat mengunjungi RSUD Tanjung di Kabupaten Lombok Utara. Ermalena mengaku prihatin atas kondisi RS yang beratapkan tenda darurat tersebut. Meskipun diketahui, kini tengah dibangun RS sementara, namun pembangunannya belum selesai secara tuntas.

“Kita juga terus desak pemerintah agar fasilitas RS di NTB dapat segera dipulihkan. Agar masyarakat NTB dapat segera mendapatkan haknya atas kesehatan,” harap Ermalena usai memimpin rapat Tim Kunker Komisi

IX DPR RI dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (01/11). Pertemuan ini membahas situasi NTB pasca gempa bumi yang belum pulih.

Ermalena menyampaikan maksud kedatangan Tim Kunker Komisi IX DPR RI ke NTB ini, diantaranya guna melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa. Seperti meninjau fasilitas kesehatan, melihat progres pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang digagas Kementerian Tenaga Kerja, untuk melatih tenaga tukang membangun rumah tahan gempa.

Di samping itu, Komisi IX DPR RI juga ingin mengetahui perkembangan kasus malaria yang beberapa waktu lalu menjangkiti Kabupaten Lombok Barat hingga ditetapkan berstatus KLB. “Kami sengaja hadir bersama seluruh mitra kerja untuk mendengar masukan, keluhan dan saran dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan laporan pembahasan di DPR,” jelas legislator PPP itu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi melaporkan, akibat bencana itu, kondisi pelayanan kesehatan di 7 kabupaten/kota turut terdampak. Dihadapan Gubernur NTB dan Komisi IX DPR RI, ia mengungkapkan sarana kesehatan sudah tidak dapat digunakan lagi.

“Misalnya di Kabupaten Lombok Barat, kerusakan mencapai 50 persen. Namun kami tetap berusaha mengembalikan akses pelayanan masyarakat, melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes Sementara dan alat kesehatan seadanya,” jelas Nurhandini. ■ *hs/sf*

Komisi IX Desak Pemda Serious Kembangkan BLK



Tim Kunker Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus meninjau BLK di Magelang, Jateng

Kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) pasca reformasi yang diambil alih oleh pemerintah daerah (pemda) dari pemerintah pusat cukup memprihatinkan. Hal itu terlihat dari peralatan BLK yang makin menua, sampai tenaga instruktur yang semakin berkurang. Karena itu, Komisi IX DPR RI mendesak agar pemda mengembangkan kapasitas dan kualitas BLK, guna memperkuat dan memperluas kesempatan kerja bagi calon-calon tenaga kerja.

“Saya lihat peran BLK cukup penting, apalagi Presiden pada tahun 2019 nanti mencanangkan penguatan SDM. BLK berperan penting untuk *support* program yang dicanangkan Presiden,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus usai memimpin Tim

BLK Jambi Butuh Revitalisasi Alat dan Kaderisasi Instruktur

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jambi memberikan perhatian pada revitalisasi alat yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) Jambi. Perbaikan BLK merupakan upaya mengurangi pengangguran dan pencari kerja sehingga mempunyai kualitas yang siap diterima di dunia kerja. Anggota Komisi IX DPR RI Zulfikar Achmad menegaskan, BLK Jambi butuh revitalisasi alat pelatihan dan kaderisasi instruktur.

Dalam peninjauan ke BLK Jambi, Tim Kunker Komisi IX DPR RI menemukan peralatan pelatihan industri yang sangat tertinggal dan sudah tidak sesuai dengan kemajuan industri. Seperti mesin jahit dan keterampilan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi jurusan automotif, jurusan listrik, jurusan elektronik, jurusan bangunan, jurusan teknologi mekanik, jurusan tata niaga, dan jurusan pertanian yang membutuhkan pembaharuan.

“Kepala daerah sangat dominan, kalau perlu setiap bulan, datang ke Jakarta koordinasi dengan kementerian bahwa BLK Jambi luas dan bagus, tetapi peralatannya tidak bagus dan tidak sebanding dengan yang dibutuhkan.



Anggota Komisi IX DPR RI Zulfikar Achmad

Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI menggelar pertemuan dengan Bupati Magelang dan jajaran serta mengunjungi BLK di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (01/11).

BLK yang bermotif “Membangun Insan Berkarya” dengan keterampilan seperti menjahit, las, dan merakit komputer ini peralatannya sudah cukup tua. Selain itu, instrukturinya akan semakin berkurang, lantaran akan memasuki usia pensiun. Melihat kondisi tersebut, Ichsan sekali lagi meminta pemda memberi perhatian serius kepada BLK. Jangan hanya tergantung kepada APBN, tetapi juga harus didukung APBD. Apalagi BLK juga berperan penting untuk mengembangkan SDM terampil dan berkualitas.

Legislator Partai Golkar ini juga melihat perlunya evaluasi kebijakan dan regulasi terkait posisi BLK di Indonesia. Pasalnya ada tumpang tindih kebijakan, ada hal yang tidak sinkron antara kebijakan yang satu dengan yang lain. “Makanya kami memiliki ide untuk membentuk Panja Pengawasan BLK, sebagai upaya memperkuat posisi BLK dalam menopang penguatan SDM di Indonesia,” imbu Ichsan. ■ mp/sf

Instrukturinya juga sudah mau pensiun. Nah ini disekolahkan, sebab ada dana. Kalau kepala daerah tidak bisa datang, ya kepala dinas,” papar Zulfikar di BLK Jambi, Jumat (02/11).

Anggota Dewan dari dapil Jambi ini menyarankan agar kepala daerah setempat atau Kepala Dinas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas BLK di Jambi. “Saya minta ke depannya, datanglah ke pusat, bawa proposal apa yang kita mau. Tidak sekaligus besar, tapi bertahap,” ujarnya.

Terkait dengan pengkaderan instruktur yang ada di BLK Jambi, Zulfikar mengatakan kalau pusat tidak bisa membiayai, sementara pemerintah daerah harus kreatif membina instruktur. Menurutnya pemerintah daerah jangan sekedar menunggu harus pro aktif.

Bagi mantan Bupati Bungo selama dua periode ini, membangun daerah tidak bisa menunggu, harus ada inisiatif dari pimpinan daerah. “BLK Jambi harus ada perhatian khusus dari Kepala Daerah, sebelum diserahkan ke pusat. Saya sudah dua kali datang ke sini masih seperti ini terus,” ungkap Zulfikar. ■ eko/sf

Komisi XI Soroti Kinerja Pengawasan BPK dan BPKP

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih memperhatikan lagi hitungan strategis mengenai proses perencanaan target-target BPK dalam pengawasan keuangan negara dan perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses ke DI Yogyakarta

Hal itu diungkapkannya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Kepala Kanwil Unit Eselon 1 (satu) Kemenkeu Se-Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Kepala Perwakilan BPK, serta Kepala Perwakilan BPKP DI Yogyakarta di Kantor Aula Kanwil Pajak, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (01/11).

“Kami meminta BPK dan BPKP menyampaikan analisa laporannya secara lebih detail lagi kepada Komisi XI, sehingga suatu kondisi pengawasan bisa disimpulkan bagaimana keadaannya. Analisa terhadap proses inilah yang kita diskusikan, jadi bukan hanya sekedar mengejar target-target angka saja,” kata Marwan.

Dalam pertemuan tersebut, legislator Partai Demokrat itu kembali mengingatkan tentang perlunya pemerintah daerah dan semua entitas *auditing* memahami secara optimal sistem pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengawasan internal dan eksternal.

“Sesungguhnya pertarungan ke depan, pada tahun 2045 nanti adalah pertarungan tentang tata kelola negara yang baik dan birokrasi yang lebih efisien. Negara yang bisa mengolah ini, dia akan menjadi bangsa pemenang,” tandas legislator dapil Lampung itu.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan, BPK harus independen dari segala tekanan dalam pemeriksaan dan pengawasan, bahkan BPK juga tidak harus takut pada tuntutan-tuntutan. Menurutnya, adanya tuntutan merupakan hal yang biasa.

“Di setiap tuntutan audit, bahkan dalam laporan tindakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selalu ada potensi *fraud* (penipuan). Di sini BPK harus jeli dan segera introspeksi, mau itu *general audit* atau *financial audit*, BPK juga harus mengukur resiko *fraud* di transaksi keuangan, sehingga kesalahan audit berakibat tuntutan bisa diantisipasi,” pesan legislator PKS itu. ■ gd/sf

Perpindahan Status Perguruan Tinggi Daerah Membingungkan

Status penyerahan dan pengambilalihan perguruan tinggi, politeknik dan akademi semula di bawah pemerintah daerah ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) hingga saat ini masih membingungkan. Tentu saja bila ketidakjelasan itu terus berlarut, bisa merugikan terutama bagi peserta didik.

Komisi X DPR RI mendapatkan informasi tersebut pada saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Aceh beserta jajaran *stakeholder* bidang pendidikan tinggi dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Reses guna menyerap aspirasi langsung dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan membuat kebijakan di masa mendatang. “Saya yakin ini tidak hanya di Aceh, tetapi di provinsi lain bahkan di kabupaten kota yang dulu juga membuat perguruan tinggi semacam akademi dan politeknik juga mengalami hal yang sama,” ujar Ketua Tim Kunker Abdul Fikri Faqih kepada *Parlementaria* di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (01/11).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga saat ini masih ada akademi atau politeknik yang dulunya milik pemda, belum ada penyelesaiannya. “Harus ada kejelasan apakah kemudian mereka harus mengelola dirinya sendiri menjadi swasta, atau bergabung dengan universitas negeri yang ada? Ini ternyata banyak problematikanya,” tambah Fikri.

Legislator Dapil Jawa Tengah ini mendorong agar permasalahan ini perlu ditindaklanjuti di tingkat pusat. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri dan Kemristekdikti duduk bersama menemukan solusi terbaik serta ketegasan status dan langkah yang akan diambil



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

menyikapi status akademi dan politeknik yang berada di daerah.

“Akademi dan politeknik tersebut harus tetap eksis. Sementara APBD tidak boleh diarahkan ke mereka. Ini saya kira masukan yang luar biasa dan harus segera ada penyelesaiannya,” tutup legislator Partai Keadilan Sejahtera itu. ■ es/sf

Simplifikasi Tarif Cukai Rokok Perlu Disesuaikan

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan, kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau perlu dikaji kembali. Hal ini agar tidak memberi dampak terhadap petani penghasil tembakau dan Industri Hasil Tembakau (IHT) tingkat menengah.



Anggota Tim Kunker Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat menyerahkan cenderamata kepada Bank Indonesia di Surabaya, Jatim

“Menjadi konsen kita ketika pemerintah mengeluarkan simplifikasi tarif cukai, karena memberikan dampak serius terhadap IHT dan petani penghasil tembakau,” ungkap Andreas usai mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BPS Jatim, BI Jatim, di Surabaya, Kamis (01/11).

Legislator PDI-Perjuangan itu melihat, pertumbuhan ekonomi Jatim sangat tergantung pada industri pengolahan dan sektor pertanian. 47 persen hasil taninya adalah tembakau. “Jatim merupakan salah satu produsen tembakau terbesar, sehingga PMK Nomor 146 Tahun 2017 sangat berdampak terhadap industri menengah dan petani tembakau,” imbuh Andreas.

Dampaknya, lanjut Andreas, akan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan dan penyerapan hasil tembakau dari petani. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dan *stakeholder* terkait bisa duduk bersama dalam menentukan tarif cukai. Agar kebijakan yang dikeluarkan tidak berdampak buruk kepada satu belah pihak. “Politik jangan ada jalan buntu, harus ada dialog untuk kepentingan bersama,” tutup legislator dapil Jatim itu. ■ rnm/sf

Komisi X Apresiasi Pengelolaan Monkey Forest Ubud



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau potensi destinasi pariwisata Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto menilai destinasi wisata Monkey Forest Ubud merupakan sebuah keajaiban. Karena wisata konservasi alam yang dikelola oleh warga dan aparat Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ini mampu menyedot 10 persen dari 15 juta turis yang datang ke Indonesia pada tahun 2018. Setidaknya, 1,5 juta wisatawan telah berkunjung ke Monkey Forest Ubud.

“Monkey Forest Ubud ini sebuah wisata konservasi alam yang dikelola oleh pemerintahan desa. Bagaimana jika desa-desa lain mampu seperti Desa Padang Tegal ini, rakyat Indonesia pasti hidup makmur,” kata Djoko saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali, Kamis (01/11).

Legislator Partai Demokrat ini sangat mengapresiasi kemandirian warga dan aparat Desa Padang Tegal yang dapat mengembangkan tanah sekitar 12,5 hektar sehingga dapat memberikan hal besar bagi Indonesia. Menurutnya belum ada tempat unik sekalipun yang dapat memberikan pendapatan daerah dan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar.

“Desa Padang Tegal mampu meraup Rp 65 miliar lebih dari pengelolaan Monkey Forest Ubud, dan memberikan

pendapatan pajak kepada negara sekitar Rp 7 miliar lebih. Melihat bagaimana wisata alam ini dikelola dengan baik dan paparan kinerjanya yang bagus, birahi saya meluap-luap karena latar belakang pendidikan saya Teknik Konservasi Lingkungan di UGM,” jelas politisi dapil Jawa Tengah III tersebut.

Djoko menambahkan, Wisata Monkey Forest Ubud ini bisa seperti wisata kota tua di Kroasia bernama Dubrovnik, sebuah kota tua yang cantik di pinggir pantai. Ia melihat, saking banyak turis yang datang ke sana, terpaksa kedatangan turis dihentikan dan diatur jumlahnya agar tetap nyaman. Destinasi wisata Monkey Forest Ubud ini nantinya bisa seperti Dubrovnik saking tinggi jumlah kunjungan turis.

“Kami minta Kementerian Pariwisata menjadikan wisata Monkey Forest Ubud sebagai contoh sukses yang wajib ditiru seluruh desa di Indonesia. Sudah pasti

banyak desa memiliki keunikan, misalkan, di daerah pemilihan saya di Grobogan, Blora memiliki Api Abadi Mrapen, yang bisa dikelola dengan baik menjadi wisata kelas dunia,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bendesa (Desa Adat) Padang Tegal I Made Gandra yang menerima Tim Kunker Komisi X DPR RI menjelaskan, hutan yang berisi sekitar 900 monyet ini mulai dikelola masyarakat Desa Padang Tegal, Ubud, Kabupaten Gianyar sejak tahun 1971. Ia memaparkan, destinasi ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat, dan mulai dikelola secara profesional tahun 1980-an.

“Kunjungan turis dari tahun ke tahun meningkat terus, awalnya luas hutan hanya 8,5 hektar pada tahun 2013, kami perluas menjadi 12,5 hektar pada tahun 2017. Jadi hutan lindung ini yang menjadi paru-paru di kota Ubud makin meluas,” jelas Made Gandra. ■ eps/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan keterangan pers usai memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau Perpustakaan Palnam Banjarmasin

Komisi X Tinjau Renovasi Perpustakaan Palnam Banjarmasin

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau langsung progress renovasi Perpustakaan Palnam, di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Renovasi itu berupa pengerjaan pelebaran ruang anak (Kids Library) dan pemugaran perpustakaan untuk membuat ruang-ruang perpustakaan lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.

“ Kita lihat ada progres pembangunan di sini, khususnya buat lebih ramah penyandang disabilitas.

Ini perlu diseriusi dan didukung karena memang sudah jadi komitmen Perpustakaan Nasional untuk hal itu,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Tim Kunker meninjau Perpustakaan dan Kearsipan Palnam, Banjarmasin, Kalsel, Kamis (01/11).

Dalam peninjauan ini, selain diikuti oleh 14 Anggota Komisi X DPR RI, juga

didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel M. Yusuf Effendi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel M. Ramadhan, serta sejumlah mitra kerja Komisi X DPR RI.

Hetifah berharap, ke depannya memang perpustakaan bisa dijadikan wadah bagi siapapun untuk berkarya. “Termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Kalau perlu nanti yang pengangguran juga bisa mencari inspirasi

di perpustakaan, jadi semua kalangan bisa mencari inspirasi di sini,” harap legislator Partai Golkar itu.

Selain itu, Hetifah juga mengapresiasi upaya Dispersip Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kunjungan anak-anak lewat *Kids Library* yang sudah dibangun dan terus diperbaiki. “Promosi yang dilakukan sangat bagus untuk meningkatkan kunjungan anak-anak yang bisa mencapai 3 kali lipat,” apresiasi legislator dari Kaltim itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kalsel Nurliani Dardie melalui Sekretaris Dispersip Kalsel M. Ramadhan menjelaskan, pihaknya akan terus menggenjot upaya pemugaran Perpustakaan Palnam agar lebih ramah penyandang disabilitas dan anak-anak. ■

hr/sf



Foto: Tasya/rni

Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Yohannes O.I Tahapari menghadiri penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik 2018

DPR Berkomitmen Terus Terbuka Kepada Masyarakat

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menghadiri acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018 oleh Komisi Informasi Publik (KIP) untuk Kategori “Menuju Informatif”. Pada kesempatan tersebut, Indra menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

“Sekarang masyarakat cukup mengakses aplikasi DPR Now!, itu bisa *real time* melihat semua persidangan produk politik DPR. Jadi secara *output* dan *outcome*, DPR sudah menghasilkan suatu produk yang bisa diakses secara terbuka dan tidak ada lagi yang ditutupi,” terang Indra saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (05/11).

Aplikasi DPR Now! merupakan salah satu produk pendukung keterbukaan informasi. Produk ini merupakan hasil tindak lanjut DPR RI sebagai salah satu Parlemen Terbuka (*Open Parliament*). Masyarakat pun dapat secara bebas

menyampaikan aduan ataupun keluhan yang akan dijemputi oleh DPR RI dan kemudian disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

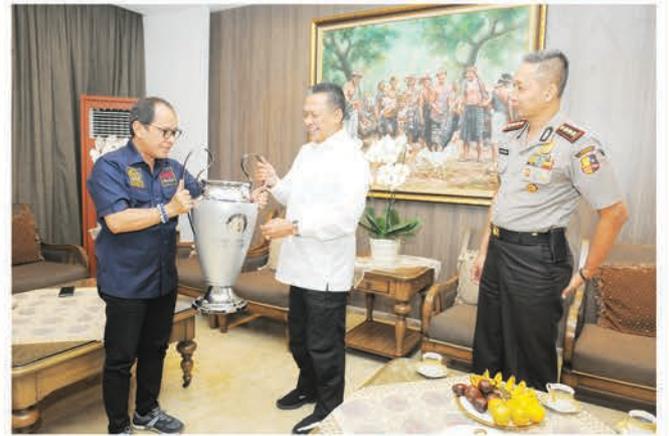
Indra pun menyampaikan bahwasanya seluruh Pimpinan DPR RI mendukung secara penuh keterbukaan informasi di DPR RI, baik informasi politik ataupun administratif. Hal ini merupakan bentuk implementasi aturan keterbukaan informasi yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ia pun berharap, UU tersebut akan diimplementasikan dan dijalankan dengan baik oleh Pejabat Pengelola

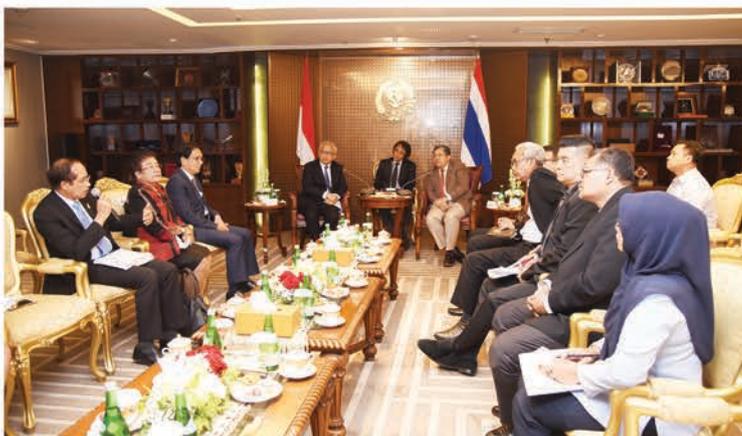
Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI, serta mendorong agar PPID DPR RI semakin terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPR RI.

“PPID kita sudah cukup baik dengan perangkat-perangkat yang memang sangat kita perhatikan. Kita mengupayakan agar PPID kita ini semakin terbuka dalam memberikan informasi publik dan selalu bersikap responsif dan akuntabel. Karena bagaimanapun amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah perintah Undang-Undang yang semua lembaga negara harus mematuhi dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan,” jelas Indra.

Penganugerahaan Kategori II kepada DPR yaitu “Menuju Informatif” memiliki jumlah nilai antara 80-89.9. Kategori ini dinobatkan berdasarkan hasil evaluasi dan *monitoring* yang dilakukan oleh KIP terhadap PPID di semua badan publik dan partai politik di Indonesia, termasuk keterbukaan informasi di DPR RI. ■ **nap/sf**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan piala bergilir PORSIMAPTAR Akademi Kepolisian XVIII Bhayangkara Carnaval 2018 kepada Komandan Resimen Taruna dan Siswa Akpol, di Widya Chandra, Jakarta, Senin (05/11). Foto: Runi/hr



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Wakil Ketua GKS DPR RI - Parlemen Thailand Ayub Khan saat menerima kunjungan Delegasi Parlemen Thailand, di Gedung DPR RI, Senin (29/10). Foto: Runi/hr



Tim Monitoring Bagian Penerbitan Setjen dan BK DPR RI melaksanakan monitoring dan evaluasi pendistribusian Majalah dan Buletin Parlemen di Pontianak, Kalbar, Senin (05/11). Foto: Oji/hr